



Edisi IV
Tahun 2021



Media Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Penyerahan LHP Semester II
Tahun 2021 Provinsi Lampung



Bandar Lampung, Rabu (29 Desember 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung hari ini menyerahkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung; dan
2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan

Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya.

Penyerahan LHP ini diserahkan langsung dengan menerapkan protokol kesehatan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama, kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Lanjut ke Hal. 2

Daftar Isi	Halaman 1	Halaman 3	Halaman 5
	- LHP Provinsi	- Penyerahan LHP	- Galeri Foto
	Halaman 2	Halaman 4	Halaman 6
	- Seleksi CPNS	- Budaya	- Dari Redaksi



Lampung menyampaikan bahwa sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada Pemerintah Provinsi Lampung terkait konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya terhadap pemeriksaan pada Semester II Tahun 2021 juga telah disampaikan rekomendasi sebagaimana yang dimuat dalam LHP.

Sesuai Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Gubernur dan Ketua DPRD akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Seleksi Kompetensi CPNS Tahun 2021



BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2021 yang diadakan pada tanggal 29 November s.d. 4 Desember 2021 yang diikuti oleh 92 orang peserta dan satu orang peserta adalah penyandang disabilitas.

Pelaksanaan SKB CPNS tersebut dilakukan di Ruang Auditorium lantai 3, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19.

SKB CPNS diikuti lulusan dari berbagai disiplin ilmu yaitu Akuntansi, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ilmu Hukum,

Ilmu Komunikasi, Manajemen, Sastra Inggris, Sistem Informatika, Statistika, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Administrasi Perkantoran yang akan mengisi formasi sebagai pemeriksa, pranata computer dan pengolah data informasi dan hukum.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Andri Yogama menyatakan kepada para peserta bahwa dalam seleksi ini jangan pernah berpikir untuk melakukan kecurangan karena jika nanti diterima dan bekerja di BPK akan bertugas mencari kecurangan



Bandar Lampung, Selasa (28 Desember 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sebelas pemeriksaan pada Semester II Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2021 pada Pemkot Bandar Lampung;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkot Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. triwulan III) pada Pemerintah Kota Metro dan Instansi Terkait Lainnya di Metro;
4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana Dalam Rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi, dan Menyeluruh TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab Lampung Selatan dan Instansi Terkait Lainnya ;
6. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemkab Lampung Tengah dan Instansi Terkait Lainnya;
7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2021 pada Pemkab Lampung Tengah;
8. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab Tanggamus dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Agung;
9. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab Way Kanan;
10. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana Dalam Rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh TA 2020 s.d. Semester I

2021 pada Pemkab Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya;

11. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2020 dan Semester I 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung.

Penyerahan LHP ini diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama. Dalam pidatonya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung menyampaikan bahwa sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada Pemerintah Kabupaten, Kota, serta Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung terkait ~~konsep~~ rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya terhadap pemeriksaan pada Semester II Tahun 2021 juga telah disampaikan rekomendasi sebagaimana yang dimuat dalam LHP.

Sesuai Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ~~selambat-lambatnya~~ 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah dan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk terus memperbaiki pengelolaan dan ~~pertanggungjawaban~~ pelaksanaan APBD.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam ~~sambutannya~~ mewakilinya Bupati/Walikota mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan dapat meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah ~~Sumarsono~~, dalam sambutannya mewakilinya Ketua DPRD Kabupaten/Kota mengatakan bahwa LHP akan menjadi bahan perbaikan bagi segenap jajaran Pemerintah Daerah dan selaku Pimpinan DPRD sesuai kewenangannya akan menindaklanjuti dan membahasnya dengan pihak terkait, serta akan melakukan pengawasan.



MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN

Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat.

Seperti juga Suku Pepadun, Suku Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

“Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.

Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (awan gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.

Di lingkungan masyarakat adat Saibatin, ada perbedaan antara golongan penyimbang batin (keturunan bangsawan saibatin garis lurus) dan golongan orang biasa. Golongan penyimbang batin dapat diketahui dari kepemilikan dan hak menggunakan benda-benda perlengkapan adat. Sedangkan golongan lainnya adalah golongan masyarakat yang tidak mempunyai benda-benda perlengkapan adat dan tidak berhak memakainya. Bagi masyarakat adat Saibatin, tertutup kemungkinan bagi golongan bangsawan lebih rendah untuk meningkatkan diri menjadi golongan bangsawan yang lebih tinggi.



Galeri Foto

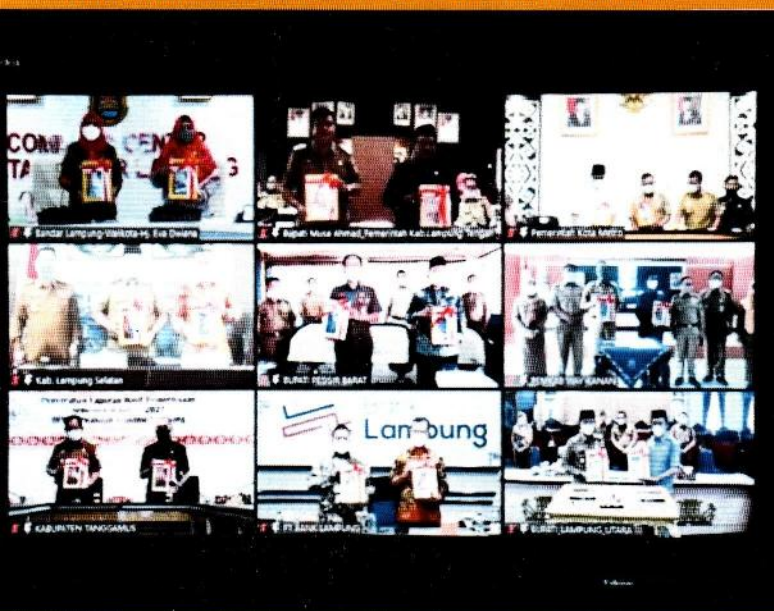
Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

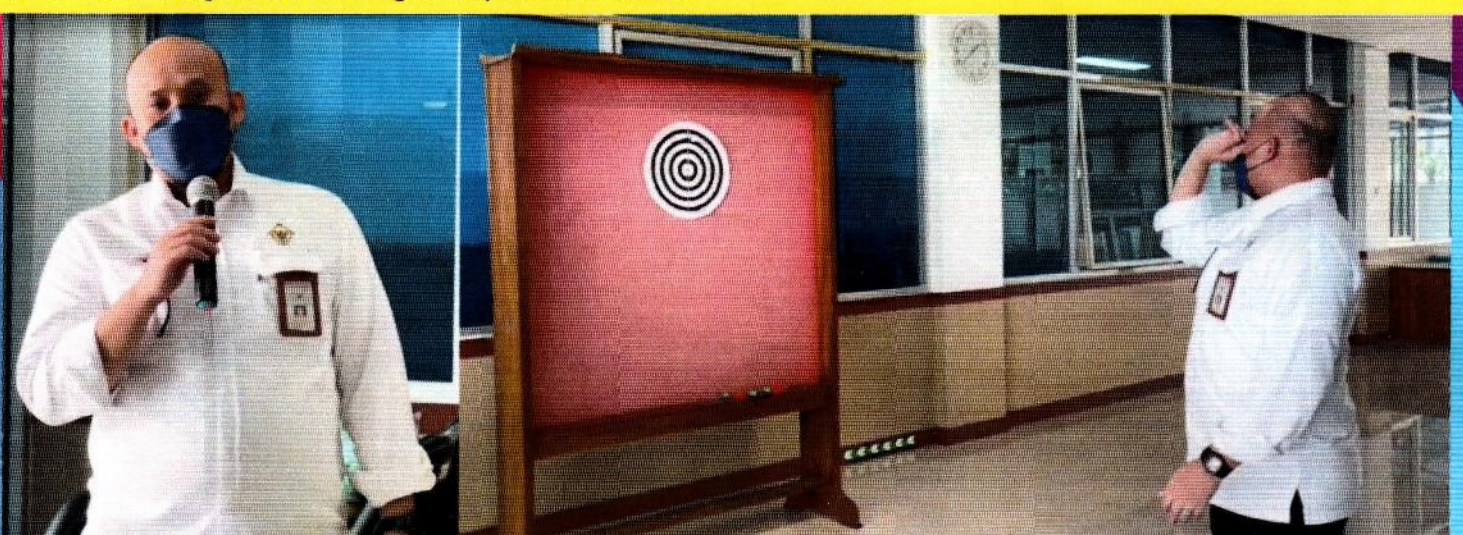


Penyerahan LHP Secara Virtual Semester II 2021

Pembukaan Seleksi CPNS



Pembukaan Rangkaian Olah Raga Perayaan HUT BPK RI





*Dirgahayu
BPK RI*



*Selamat Natal
dan
Tahun Baru
2022*

Tim Redaksi

Pengarah Teknis
Maula Rusindrawan

Penanggungjawab
Andri Yogaya

Redaktur
Teguh Srihasto

Layout dan Desain
Ogan Dinahan

Editor
Desesri Ralifia

Fotografer
Josep Ade

Layout dan Desain
Topan Santoso



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Pangeran Emir M. Noor No. 11 B Teluk Betung Utara
Bandar Lampung 35215 Telp. (0721) 474828 Fax. (0721) 472872
www.bandarlampung.bpk.go.id